

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYRAKAT DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

Aslam Rofiq Hasan

NPP. 31.0517

Asdaf Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: aslamrofiqhasan01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Djoehermansyah Djohan, MA.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): There are community organizations in Pamekasan district that are at odds with the community and it is not uncommon for there to be friction between mass organizations, thus disrupting security and public order. **Purpose:** To determine the role of the national unity body and politics of Pamekasan district in empowering community organizations and to analyze the inhibiting factors in carrying out community empowerment. **Methods:** This research uses a qualitative method and the technical sample used is Purposive Sampling. **Results:** The role of the Pamekasan district national and political unity body in empowering community organizations in Pamekasan district using the Seokanto concept is not yet optimal. This is due to differences in views of mass organizations, situational conditions and organizational conditions **Conclusion:** The dimensions of norms carried out by the Pamekasan Regency National and Political Unity Agency in empowering community organizations are not running optimally. This is because the vision and mission contained in community organizations in Pamekasan district is very different from the vision and mission in Bakesbangpol, thus causing frequent friction between the government and mass organizations. The behavioral dimensions applied by the National Unity and Political Agency of Pamekasan Regency in empowering community organizations are quite good, with the high role of community organizations as a forum for accommodating community aspirations and the granting of permission by Bakesbangpol for activities to increase the ease of community organizations to carry out their functions. The dimensions of individual behavior applied by the Pamekasan Regency National and Political Unity Agency in developing community organizations have been going well, with various trainings being held frequently for mass organizations such as basic leadership training and national insight jamborees.

Keywords : Community Organizations, Empowerment, Bakesbangpol.

ABSTRAK

Permasalahan(GAP): Terdapat organisasi masyarakat di kabupaten Pamekasan yang bergesekan dengan masyarakat bahkan tidak jarang terjadi gesekan antar ormas sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. **Tujuan:** Untuk mengetahui peran badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten pamekasan dalam pemberdayaan organisasi masyarakat serta untuk menganalisis factor penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian teknis sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. **Hasil/Temuan:** Peran badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pamekasan dalam pemberdayaan organisasi masyarakat di kabupaten Pamekasan dengan menggunakan konsep Seokanto yaitu belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan ormas, kondisi situasional dan kondisi keorganisasian. **Kesimpulan:** Dimensi norma yang dilakukan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pamekasan dalam pemberdayaan organisasi masyarakat tidak berjalan optimal. Hal ini di sebabkan visi misi yang terdapat dalam organisasi masyarakat yang ada di kabupaten Pamekasan jauh berbeda dengan visi misi yang ada di Bakesbangpol, sehingga menyebabkan sering terjadinya gesekan antara pemerintah dan ormas. Dimensi prilaku yang terapkan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten pamekasan dalam pemberdayaan organisasi masyarakat cukup baik, dengan tingginya peran dari organisasi masyarakat sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemberian izin oleh Bakesbangpol untuk berkegiatan menambah kemudahan organisasi masyarakat untuk melaksanakan fungsinya. Dimensi prilaku individu yang diterapkan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pamekasan dalam pembinaan organisasi masyarakat sudah berjalan baik, dengan sering diadakannya berbagai pelatihan kepada ormas seperti latihan dasar kepemimpinan, jambore wawasan kebangsaan.

Kata Kunci: Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan, Bakesbangpol.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), (Sukma, 2013). Ormas menjadi sebuah tempat atau sarana untuk masyarakat menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dan tempat mengembangkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Manalu, 2022). Ormas-Ormas tersebut biasanya digunakan sebagai cara mempertahankan kepentingan golongan mereka masing-masing sehingga tidak jarang terjadi gesekan antar Ormas yang akhirnya menimbulkan huru-hara di kalangan (Purba, 2022).

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Winardi, 2011). Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi

kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok (Wibowo, 2015), yaitu:

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warga Negara Republik Indonesia.
2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional,

Dilihat dari fungsinya, ormas berperan sebagai penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus Ormas memberikan kontribusi positif (Harahap, 2013). Peranan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sebagai sebuah negara hukum yang demokratis pengakuan terhadap Ormas menjadi sangat penting karena sifat Ormas yang membawa suara, aspirasi dan sekaligus kontrol masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah. (Wahyuningtias, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) (Wibowo, 2015).

Di kabupaten Pamekasan sendiri, banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Melihat hal itu, Bakesbangpol Pamekasan melakukan pemberdayaan organisasi masyarakat agar organisasi masyarakat yang ada di kabupaten pamekasan melaksanakan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Peran badan kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Banyak persoalan menyangkut organisasi masyarakat di kabupaten Pamekasan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Persoalan ini mulai dari perselisihan antar organisasi masyarakat, gesekan yang terjadi antara organisasi masyarakat dengan masyarakat serta munculnya sifat fanatikme terhadap Ormas sehingga membuat kegaduhan di tengah

masyarakat. Oleh karena itu Bakesbangpol Pamekasan melakukan pemberdayaan terhadap Ormas yang ada di Pamekasan guna mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Maghfirah Maasum berjudul *Penerapan Sanksi Terhadap Organisasi Masyarakat yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan* (Maasum, 2018), menemukan bahwa Dalam melindungi kebebasan untuk berserikat maka pemerintah ingin memberlakukan sanksi terhadap pelanggar Pancasila. Namun karena masih banyaknya organisasi masyarakat yang radikal dan anti Pancasila maka penegakan sanksi ditingkatkan. Penelitian Rudiselwandi berjudul *Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak* (Rudiselwandi, 2018), menemukan bahwa bahwa Pembinaan ormas yang dilakukan kesbangpol kabupaten siak belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan karena anggaran dana pada rencana kerja kantor tidak tersedia dan hanya ditujukan untuk fasilitas dan pelayanan administrasi. Penelitian Suci Hamiken berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan* (Hamiken, 2022), mengungkapkan Kesbangpol Kota Sungai Penuh bertanggung jawab dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan urusan bidang integrasi nasional dan politik. Sehingga dalam peran kesbangpol dapat melakukan pembinaan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan melalui pelatihan atau sosialisasi, koordinasi rutin, pengawasan dan evaluasi. Penelitian Chandra Wira Hadi Santika berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat* (Santika, 2022), menemukan bahwa Masih banyak organisasi masyarakat yang melanggar terhadap hukum seperti tindakan anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat. Maka sangat penting untuk dilakukan pembinaan dan penertiban Badan Kesatuan karena keberadaan ormas juga berkontribusi dalam pembangunan negara. Penelitian Andi Ilham Nurhadi, Eva Eviany dan Udaya Majid berjudul *Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Dki Jakarta* (Nurhadi, 2024), menemukan bahwa Implementasi kebijakan program pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan efektif, hal tersebut berdasarkan hasil penelitian bahwa ke empat indikator implementasi kebijakan baik

aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek struktur birokras, aspek disposisi belum berjalan efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang di lakukan yaitu peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat. Penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat di kabupaten Pamekasan serta untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat di kabupaten pamekasan.

II METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Sugiyono menjelaskan metode deskriptif merupakan suatu metode yang dipakai untuk merepresentasikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi juga dipakai untuk membuat kesimpulan yang lebih general (Sugiyono 2005). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat di kabupaten pamekasan menggunakan pendapat dari Soekanto yang menyatakan Peran adalah komponen dinamis dari kedudukan (status), dan seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

(Soekanto, 2002). Strategi di bagi menjadi 3 dimensi yaitu norma, konsep perilaku dan perilaku individu

3.1 Norma

3.1.1 Pelaksanaan fungsi pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan akan berdasarkan pada visi dan misi Kesbangpol Pamekasan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten Pamekasan yaitu Pamekasan sejahtera dari bawah, merata dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama dengan salah satu misinya pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera. Maka keberadaan ormas dan segala kegiatan organisasi masyarakat nantinya harus disesuaikan terhadap visi dan misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan. hal tersebut dapat dilihat melalui bentuk ormas, sifat sistem, status dan paham atau ideologi organisasi masyarakat yang di anut

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, banyak organisasi masyarakat yang visi misinya sangat berbeda jauh dengan harapan dari Bakesbangpol kabupaten pamekasan. Hal ini lah yang terkadang membuat perbedaan pandangan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sehingga terkadang menimbulkan konflik. Selain itu banyak organisasi masyarakat yang tidak terdata oleh Bakesbangpol akan tetapi aktif dalam menjalankan organisasi. Hal ini memperparah kondisi yang ada di kabupaten pamekasan. Ormas yang terdata dan telah mengikuti pemberdayaan oleh bakesbangpol belum berjalan sesuai dengan harapan, akan tetapi hal ini di perparah lagi dengan ormas yang belum terdata.

3.2 Konsep Prilaku

3.2.1 Organisasi Masyarakat sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat

Organisasi masyarakat yang merupakan sebuah kelompok di dalam masyarakat sebagai penggerak kegiatan sosial-kemasyarakatan telah memiliki fungsi lebih sebagai pelaksana pengawas dan pembantu pemerintah daerah. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, organisasi masyarakat memiliki wadah dalam penyaluran aspirasi baik berupa saran, kritik, usulan kegiatan dan dalam hal melakukan koordinasi. Segala aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah mampu di sampaikan melalui organisasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi dari organisasi masyarakat untuk menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi berjalan dengan baik. Peran organisasi masyarakat dalam

menghimpun aspirasi berjalan baik di karenakan keaktifan dari organisasi masyarakat tersebut dan terdapat kesamaan terhadap tujuan yang ingin di capai.

3.2.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan melakukan aspirasi masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi masyarakat harus atas izin dari Kesbangpol melalui bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Organisasi masyarakat juga tidak hanya memiliki izin terhadap kegiatannya namun status berdirinya organisasi masyarakat harus terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, struktur organisasi tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan merupakan instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan yang memiliki uraian tugas yang dijabarkan dengan detail.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, badan kesatuan bangsa dan politik telah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini terlihat dari dilaksanakannya peran pengontrol dari Ormas dan menjadi acuan bagi Ormas dalam setiap kegiatan yang dilakukan Ormas. Pembagian tugas dan pelaksanaan yang dilakukan dengan baik oleh sub-bidang yang menangani Ormas menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengendalian dalam pemberdayaan dan pengawasan Ormas di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan Ormas dapat bekerja sama dengan baik dengan Kesbangpol terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara ormas dan Kesbangpol terkait kegiatan aksi kemasyarakatan sehingga bisa dilakukan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik serta pengulangan kualitas sumber daya manusia.

3.3 Perilaku Individu

3.3.1. Tingkat kinerja anggota organisasi masyarakat diukur kepada tingkat kinerja anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Organisasi Masyarakat sejatinya adalah wadah bagi masyarakat berkumpul dan berorganisasi yang memiliki tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dilihat bagaimana tingkat kinerja dari anggota Ormas untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran yang dilakukan badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat dilihat dari dimensi perilaku individu sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dari dilaksanannya pembedayaan organisasi masyarakat dengan cara menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan (LDK). Selain itu jamboree

wawasan kebangsaan untuk organisasi masyarakat turut dilaksanakan guna terwujudnya ormas yang di harapkan pemerintah dan masyarakat. Selain melalui kegiatan tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik juga rajin menjalin komunikasi yang aktif dan kontinu dengan organisasi masyarakat yang ada di kabupaten pamekasan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Maghfirah Maasum yang dilakukan tahun 2018 dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Organisasi Masyarakat yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun perbedaan terletak pada lokus yang berbeda dan penelitian ini membahas penerapan sanksi ormas sedangkan penelitian ini membahas peran kesbangpol dalam pemberdayaan ormas.

Rudiselwandi yang dilakukan tahun 2018 dengan judul Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. Adapun Persamaan terdapat pada pembinaan dan pemberdayaan ormas oleh kesbangpol. Adapun perbedaan terletak pada lokus dan penelitian ini membahas pembinaan ormas oleh kesbangpol belum maksimal dan keterbatasan dana sedangkan penelitian ini menggambarkan faktor penghambat dalam pemberdayaan ormas

Suci Hamiken yang dilakukan tahun 2022 dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. Adapun terdapat pada hasil peran kesbangpol dalam pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Adapun perbedaan terletak pada lokus dan penelitian ini menggunakan metode empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.

Chandra Wira Hadi Santika yang dilakukan tahun 2022 dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Adapun persamaan terletak pada pembahasan mengenai peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat serta metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Perbedaan terletak pada lokus dan penelitian ini Masih banyak ormas yang melanggar terhadap hukum seperti tindakan anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat sedangkan penelitian penulis belum optimalnya kesbangpol dalam melakukan pemberdayaan ormas

Andi Ilham Nurhadi, Eva Eviany dan Udaya majid yang dilakukan tahun 2024 dengan judul implementasi kebijakan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di provinsi DKI Jakarta. Adapun persamaan terletak pada pembahasan mengenai pemberdayaan organisasi masyarakat serta metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada lokus dan penelitian sebelumnya terfokus implementasi kebijakan dalam pemberdayaan organisasi masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat belum optimal sepenuhnya. Masih adanya pelanggaran oleh organisasi masyarakat meskipun pemberdayaan terus dilakukan. Komunikasi dan pendekatan yang dilakukan antara Badan Kesbangpol dengan Organisasi Kemasyarakatan menjadi faktor utama dalam melakukan pemberdayaan terhadap ormas di Kabupaten Pamekasan.
 - a. Pelaksanaan kegiatan ormas didasarkan pada visi dan misi Badan Kesbangpol Kabupaten Pamekasan yang telah disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Maka pemberdayaan organisasi masyarakat oleh kesbangpol dilakukan untuk mewujudkan peningkatan koordinasi dan pengendalian pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan fungsi ormas dilakukan oleh kesbangpol seperti penyusunan program kerja, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 - b. Setiap ormas memiliki tujuan, aspirasi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini menandakan ormas telah mewakili dan menampung aspirasi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Segala aspirasi dari ormas berupa saran, kritik, usulan kegiatan dan koordinasi bisa tersampaikan melalui bidang pemberdayaan ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Peran dukungan Kesbangpol sebagai pembina dan pengawas pemberdayaan ormas telah melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan fasilitasi dengan menjalin hubungan komunikasi secara *continue* dan berkesinambungan.

2. Faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan organisasi masyarakat di Kabupaten Pamekasan antara lain :

- A. Perbedaan Pandangan
- B. Kondisi Situasional
- C. Kondisi Keorganisasian

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperdalam fokus penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada Bakesbangpol kabupaten Pamekasan, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 2013. *Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermiken, Suci. 2022. Peran badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Politik Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Jan Maha*, Vol. 4, No 1, Februari 2022.
- Maasum, Magfirah. 2017. Penerapan Sanksi Terhadap Ormas yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Lex Crimen*, volume 6, No 5, Juli 2017.
- Manalu, P. D. P. (2022). Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.
- Nurhadi, Andi Ilham, dkk. 2024. Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pemerintah*, Vol. 10, No. 1, Maret 2024.
- Purba, J. R. (2022). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

- Santika, Chandra Wira Hadi. 2022. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Selwandi, Rudi. 2018. Pembinaan Organisasi kemasyarakatan Oleh Kantor kesatuan bangsa Dan Politik Kabupaten Siak. *Skripsi Universitas Islam Riau*.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raza Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). *Definisi Metode Deskriptif*. <https://idtesis.com/metodedeskriptif/>
- Sukma, I. W. P. W. (2013). Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Wahyuningtias Mardaningrum. 2018. “Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi {Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Wibowo, Catur dan Herman Harefa. 2015. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, hlm. 1.
- Winardi, J. 2011. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: PT Rineka Cipta

